BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. *Local Strongman*

Perubahan sosial politik yang terjadi dan merubah warna masyarakat dunia pada saat ini, dinilai sebagai dampak pergerakan negara-negara di dunia dan masyarakat di masa lalu. Atau dalam terminologi Marx, dikenal dengan diskursus *materialisme histroris*[1] Di mana globalisasi, kolonialisasi, dan industrialisasi melahirkan pengaruhnya yang begitu primer. Huntington menjelaskan, bahwa perubahan yang terjadi atas negara dan masyarakat di dunia hingga memunculkan dualisme potret antara negara kuat dan negara lemah bukanlah disebabkan karena macam-macam jenis pemerintahan yang dianut, tetapi lebih pada efektifitas kinerja sebuah pemerintahan itu berjalan.[2]

Negara, dalam masa tertentu, pernah menjadi simbol tunggal dalam dinamika kehidupan masyarakat karena kapabilitas dan koersinya yang begitu besar. Segala garis kebijakan tersentralisasi pada wujud negara sebagai satu-satunya pemilik kekuatan otonom. Negara menjadi pusat kuasa yang tak terbendung. Pengalaman

---

[7] *Materialisme Historis* merupakan sebuah konsep dari filsafat Karl Marx yang berarti seluruh peradaban manusia berasal dari kontinuum sejarah yang tak putus-putus. Pip Jone, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm 78.

[2] Joel S. Migdal, *State in Society: Studying How States And Societies Transform And Constitute One Another* (Cambridge, UK: The Press Syndicate of The University of Cambridge),hlm. 59.

ini dapat kita lihat semasa perang dunia I, II, perang dingin, dimasa kolonialisme global, dan sewaktu gelombang industrialisasi mendera dunia modern. Sedangkan pasca itu, semua kritik, peran sentral dan pengaruh negara lamat-lama ditinggalkan oleh para pengkaji/ilmuwan sosial- politik.[3]

Pasca kolonialisasi berakhir, kita pun disuguhkan dengan fenomena-fenomena baru daripada dasawarsa sebelumnya, yakni munculnya beberapa negara lemah, yang gagal menancapkan pengaruhnya di masyarakat, kesulitan melakukan kontrol terhadap warganya, dan bersusah payah memaksakan aturan konstitusi di wilayah teritorial mereka. Negara tidak dapat melakukan berbagai inisiasi kebijakan di dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat sebagaimana umumnya. Pada kasus ini, Joel S. Migdal mencoba menjelaskannya dengan membawa kita pada pemahaman bahwa negara adalah bagian yang terintegrasi dengan masyarakat. Sifat yang dimiliki negara tidak terlepas dari basis sifat masyarakat didalamnya.[4] Migdal mendefinisikan negara sebagai organisasi besar yang hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lainnya diluar dirinya.[5] Secara lengkapnya Joel S. Migdal mengatakan:

> *"The state is a sprawling organization within society that coexists with many other formal and informal social organizations, from families to tribes to large industrial enterprises. What distinguishes the state, at least in the modern era, is that state officials seek predominance over those myriad other organizations. That is, they aim for the state to make the binding rules guiding people"s*

[3] *Ibid*, h. 58.

[4] GSDRC (Governance and Social Development Resource Center) , "Document Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World – Summary," artikel ini diakses pada tanggal 24 Desember 2018 dari http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3554

[5] Joel S. Migdal, *State in Society*, h. 63.

> *behavior or, at the very least, to authorize particular other organizations to make those rules in certain realms. By "rules" I mean the laws, regulations, decrees, and the like that state officials indicate they are willing to enforce through the coercive means at their disposal. Rules include everything from living up to contractual commitments to driving on the right side of the road to paying alimony on time. They involve the entire array of property rights and any of the other countless definitions of the boundaries delineating acceptable behavior for people"*[6]
>
> "Negara adalah organisasi yang luas di dalam masyarakat yang berdampingan dengan banyak organisasi sosial formal dan informal lainnya, dari keluarga, suku, perusahaan industri besar. Yang membedakan negara, di era modern setidaknya, adalah bahwa pejabat negara mencari dominasi atas segudang organisasi lainnya. Artinya, tujuan mereka untuk negara adalah untuk membuat aturan yang mengikat yang membimbing perilaku masyarakat atau, setidaknya, untuk mengotorisasi/ menguasai organisasi lain khususnya untuk membuat aturan-aturan pada aspek tertentu. Dengan "aturan" saya mengartikannya hukum, peraturan, keputusan, dan seperti pejabat negara yang menunjukan kesediaan mereka untuk menegakkan melalui pemaksaan yang mereka tetapkan. Aturan mencakup segala sesuatu dari hidup, komitmen kontrak, mengemudi di sisi kanan jalan, membayar tunjangan tepat waktu. Mereka melibatkan seluruh peranti hak milik dan salah satu definisi yang tak terhitung lainnya dari batas-batas yang menggambarkan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat."
>
> (Terjemahan dari penulis)

Eksistensi organisasi-organisasi di luar negara pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan yang dapat mengurangi kapabilitas negara sebagai satu- satunya alat pengontrol yang sah. Etnisitas, klan, bahkan kelompok-kelompok macam sekte

[6] *Ibid,* hlm. 63

agama adalah macam-macam kekuatan yang bisa saja mengganggu bahkan menghalang-halangi jalannya berbagai aturan serta rambu-rambu pembangunan yang telah ditetapkan oleh negara. Hal seperti ini banyak kita temukan pada kasus dan pengalaman negara-negara di dunia ketiga.

Di negara-negara yang baru merdeka, modernisasi aturan hukum bisa jadi masih sering bertolak belakang dengan aturan-aturan tradisional yang secara kultur masih kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperparah lagi dengan kompetisi antar kelompok kepentingan di antara mereka untuk merebut kekuasaan yang diwariskan pasca bangsa penjajah hengkang.

Maka akan terlihat maklum bila kondisi negara di dunia ketiga terbilang lemah. Sebab infrastruktur negara, baik yang berupa sumber daya manusia maupun fundamentalisme hukum, masih berada dalam tahap perkembangan. Sehingga kontrol sosial sangat sulit diimplementasikan. Beda halnya pada kasus negara-negara di eropa misalnya, di mana tentara, sistem peradilan hukum, dan mekanisme penarikan pajak terorganisir secara baik, dan telah menjadi instrumen pokok dalam wacana strategi dominasi kontrol negara terhadap masyarakat.[7] Sedang pada kasus negara-negara baru di dunia ketiga, ikhwal itu belum tercipta secara sempurna.

Beragam teori yang ada, seperti teori modernisasi, teori marxis, dan teori ketergantungan, menurut Migdal, tidak mampu menjelaskan apa-apa terhadap ketidakmampuan negara itu dalam mencapai legitimasi kontrol sosial mereka di masyarakat. Teori modernisasi terlalu mengenyampingkan konflik yang lahir

[7] GSDRC (Governance and Social Development Resource Center) , "Document Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World – Summary," artikel ini diakses pada tanggal 24 Desember 2018 dari http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3554

dalam tubuh negara, teori marxis seringkali menjurus dan terlalu fokus pada konflik antar kelas, dan teori ketergantungan, banyak mengabaikan peran masyarakat. Ketiganya memiliki kelemahan saat dihadapkan pada pertanyaan: mengapa negara A kuat sedang negara B lemah.[8]

Untuk itu, Migdal menyodorkan apa yang ia namakan dengan pendekatan *state in society*, "yang menggambarkan masyarakat sebagai arena jejaring organisasi-organisasi sosial daripada sebagai pendikotomian struktur.[9]

> *"The model I am suggesting, what I call state-in-society, depicts society as a mélange of social organizations rather than a dichotomous structure. Various formations, including the idea of the state as well as many others (which may or may not include parts of the state) singly or in tandem offer individuals strategies of personal survival and, for some, strategies of upward mobility. Individual choice among strategies is based on the material incentives and coercion organizations can bring to bear and on the organizations" use of symbols and values concerning how social life should be ordered. These symbols and values either reinforce the forms of social control in the society or propose new forms of social life. Indeed, this struggle is ongoing in every society. Societies are not static formations but are constantly becoming as a result of these struggles over social control."*[10]
>
> "Model yang saya sarankan, apa yang saya sebut state-in-society, yang menggambarkan masyarakat sebagai campuran berbagai macam organisasi sosial daripada sekedar struktur dikotomis. Berbagai formasi, termasuk gagasan negara serta banyak lagi yang lainnya (yang mungkin atau yang tidak mungkin termasuk bagian dari negara) secara tunggal atau tandem menawarkan individu-individu strategi bertahan hidup bagi pribadi dan, untuk beberapa, strategi mobilitas ke atas. Pilihan individu di antara beberapa strategi didasarkan pada insentif material dan lembaga paksaan yang dapat membawa, menanggung dan atas penggunaan simbol dan nilai organisasi

[8] Joel S. Migdal, *State in Society*, hlm. 65.

[9] *Ibid*, hlm. 49

[10] *Ibid*, hlm. 49-50

tentang bagaimana kehidupan sosial harus diwujudkan. Simbol dan nilai-nilai ini baik yang memperkuat bentuk kontrol sosial dalam masyarakat atau yang mengusulkan bentuk-bentuk baru dari kehidupan sosial. Memang, perjuangan ini sedang berlangsung di setiap masyarakat. Masyarakat bukan merupakan bentuk statis tetapi terus menerus mecari bentuk dari hasil lewat perjuangan kontrol sosial ini." (Terjemahan dari penulis)

"To be sure, in some instances, the idea-state may make and enforce many rules in the society or may choose to delegate some of that authority to other mechanisms, such as the church or market. There are other societies, however, where social organizations actively vie with one another in offering strategies and in proposing different rules of the game. Here, the mélange of social organizations is marked by an environment of conflict, an active struggle for social control of the population. The state is part of the environment of conflict in which its own parts struggle with one another. The battles may be with families over the rules of education and socialization; they may be with ethnic groups over territoriality; they may be with religious organizations over daily habits."[11]

"Yang pasti, dalam beberapa kasus, gagasan-negara dapat membuat dan menegakkan banyak aturan dalam masyarakat atau mungkin memilih mendelegasikan beberapa kewenangan ke mekanisme yang lain, seperti gereja atau pasar. Masih ada masyarakat lainnya, yang bagaimanapun, di mana organisasi-organisasi sosial secara aktif bersaing satu dengan yang lainnya dalam menawarkan strategi dan mengusulkan aturan main yang berbeda. Di sini, campuran dari berbagai macam organisasi sosial ditandai oleh lingkungan konflik, perjuangan aktif bagi kontrol sosial penduduk. Negara adalah bagian dari lingkungan konflik di mana negara merupakan bagian tersendiri yang juga berjuang dengan yang lainnya. Pertempuran mungkin saja terjadi dengan keluarga mengenai aturan pendidikan dan sosialisasi; mungkin dengan kelompok etnis mengenai kewilayahan; mungkin dengan organisasi keagamaan mengenai kebiasaan sehari-hari." (Terjemahan dari penulis)

[11] *Ibid.* Hlm. 50.

Dari paparan Migdal itu, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan penting, selain gambaran soal negara sebagai wahana konflik berbagai kepentingan organisasi sosial yang saling berebut mendapatkan pencapaian mereka terhadap kontrol sosial di masyarakat, namun juga soal kemunculan negara lemah (*weak state*) sebagai impak kekalahan negara oleh kekuatan-kekuatan informal di luar institusi resmi. Setidaknya, konsep Migdal mengenai negara lemah telah merejuvinasi kembali asumsi-asumsi Weber yang terlalu idealistik dalam mendefinisikan negara sebagai satu-satunya asosiasi politik dengan berbagai kekayaan haknya untuk memonopoli kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat[12]

> "Migdal percaya bahwa negara bukanlah satu-satunya organisasi yang hidup bersamaan dengan masyarakat. Di luar negara, bahkan lebih banyak lagi dari macam-macam organisasi yang ada, yang juga mencoba untuk memberikan dan menanamkan dominasi serta pengaruhnya seperti yang dilakukan oleh negara. Cara mereka melakukan itu semua, selain dengan memberikan insentif berupa bantuan dan keamanan, juga dengan memberikan sanksi sosial kepada siapa saja yang tidak mematuhinya. Sanksi sosial ini dapat berupa adanya tindakan kekerasan dan pengucilan. Dengan banyaknya organisasi yang menjamur di luar negara, maka masyarakat dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk memilih satu di antara mereka, mana saja yang benar-benar memanifestasikan diri sebagai kelompok yang mampu menstimulus konstruksi, strategi bertahan

[12] Daniel Lambach, "State in Society: Joel Migdal and the limit of state authority." Paper for presentation at the conference "Political Concepts Beyond the Nation State: Cosmopolitanism, territoriality, democracy", Danish Political Theory Network Conference, University of Copenhagen, Department of Political Science Copenhagen, 27-30 October 2004.

> hidup‟ bagi mereka. Masyarakat, dalam hal ini, bukan berarti hidup dalam kebebasan tanpa adanya aturan yang mengikat dan mengatur mereka, tapi faktanya mereka tetap hidup dalam aturan aturan, tetapi dalam alokasi yang tidak terpusat. Karena berbagai sistem aturan dan peradilan mengatur mereka dalam waktu dan secara bersamaan. Berhasil tidaknya sebuah organisasi untuk melakukan kontrol sosial terhadap anggotanya tidak saja terlihat saat mereka mematuhi segala aspek dan aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut, tetapi saat mereka juga meyakini dan sadar bahwa nilai legitimasi yang mereka berikan adalah baik dan benar."[13]

Harus digaris bawahi, bahwa kontrol sosial, dominasi, dan hegemoni merupakan alat politik paling ampuh yang mesti dimiliki negara dalam rangka mengatur, mengarahkan, memaksakan dan membatasi segala hal yang dilakukan oleh masyarakat. Tanpa memegang kendali dominasi dan kontrol atas masyarakat, negara akan menjadi lemah, dan masyarakat akan berpaling untuk mengikuti aturan dan arahan yang berasal dari organisasi informal di luar negara. Sehingga perebutan kontrol sosial di masyarakat mutlak menjadi penting sebab upaya mobilisasi masyarakat hanya akan terjadi apabila tiga komponen ini terpenuhi: partisipasi, kepatuhan, dan legitimasi. Kontrol sosial sendiri singkatnya diartikan sebagai:

> *"The state"s capacity to mobilise society rests on social control, defined as the ability to make the operative rules of the game for people in society. The major struggles in many societies are over who has the right and ability to*

[13] Hasil terjemahan penulis dalam bagian tertentu pada artikel yang ditulis oleh Daniel Lambach, "State in Society: Joel Migdal and the limit of state authority." Paper for presentation at the conference "Political Concepts Beyond the Nation State: Cosmopolitanism, territoriality, democracy", Danish Political Theory Network Conference, University of Copenhagen, Department of Political Science Copenhagen, 27-30 October 2004.

> *make the rules that guide people's social behaviour (the state or other organisations).”*[14]

> “Kapasitas negara untuk memobilisasi masyarakat bertumpu pada kontrol sosial, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat aturan operasi dari aturan main untuk orang-orang dalam masyarakat. Perjuangan utama di banyak masyarakat adalah lebih kepada siapa yang benar dan mampu membuat aturan yang membimbing perilaku masyarakat sosial (negara atau organisasi lain).” (Terjemahan dari penulis)

Ada banyak usaha yang digunakan oleh negara maupun organisasi informal dalam memaksakan aturan dan kehendak mereka. Ikhwal paling penting adalah dengan adanya “proses pemberian sanksi dan hadiah lewat beragam bentuk: insentif material, paksaan, dan manipulasi simbolik kehidupan sosial.

Adanya kelompok ataupun institusi informal di luar negara yang mengurangi efektifitas dan kapabilitas negara, oleh Migdal ditengarai disebabkan oleh kehadiran *local strongmen*/ orang kuat lokal. Orang kuat lokal, secara konsep, jelasnya didefinisikan sebagai kekuatan informal, baik yang berupa “tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan, dan sebagainya, yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun.

Di banyak kasus, orang kuat lokal sering ditemukan di negara-negara Asia-Afrika. Mereka umumnya adalah negara-negara yang baru merdeka dengan modal infrastruktur hukum dan keinstitusian yang masih sedikit pengalaman.

[14] GSDRC (Governance and Social Development Resource Center) , “Document Library, Summary: Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World – Summary,” artikel ini diakses pada tanggal 24 Desember 2018 dari http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=3554

Infiltrasi yang dilakukan oleh para orang kuat lokal di dalam negara, setidaknya menghasilkan instabilitas politik yang mau tidak mau telah meningkatkan eksistensi mereka di mata para politisi maupun implementors (sebutan Migdal untuk para pelaksana tugas pemerintah pusat di daerah untuk dijadikan partner maupun jaringan patronase – atau agen kepentingan mereka dalam momen-momen pemilu. Imbalnya, para orang kuat ini mendapatkan akses langsung pada perolehan sumber daya ekonomi yang diberikan politisi atau para implementors kepada mereka. Bahkan tak jarang, orang kuat ini berhasil melakukan lobi untuk menaruh beberapa keluarganya di pos-pos pemerintahan supaya dapat memastikan bahwa sumber proyek ekonomi yang diberikan tidak jatuh ke tangan pihak lain. Persekongkolan antara pihak birokrat, politisi, dan orang kuat lokal ini biasa disebut dengan istilah segitiga akomodasi. Kontan dengan adanya persekongkolan antara para implementors dengan orang kuat lokal ini telah menjadikan alokasi kepentingan pusat yang terangkum dalam segala kebijakan di berbagai aspek yang sejatinya akan diterapkan untuk daerah menjadi terganggu.

> "Mereka berhasil menempatkan diri atau menaruh anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi terjaminnya alokasi sumber-sumber daya berjalan sesuai dengan kehendak mereka sendiri dari pada menurut aturan-aturan yang dilontarkan dalam retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di pusat atau dikeluarkan oleh pelaksana peraturan yang kuat (Migdal 1988:256)."[15]

[15] Menurut Migdal seperti dikutip John T. Sidel, "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia," dalam John Harris, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist. Ed., *Politisasi Demokrasi Politik Lokal* Baru (Jakarta: Demos, 2005), hlm. 73.

Dalam dinamika politik lokal di Indonesia, eksistensi orang kuat lokal bisa ditelusuri lewat beragam kultur dan budaya setempat. Penisbatan *local strongmen* di masing-masing wilayah mempunyai istilah yang beragam. Di Banten misalnya, manifestasi *local strongman* digambarkan melalui julukan Jawara. Sedang istilah orang kuat lokal di Madura dikenal dengan sebutan Blater. Keberadaan dan posisi mereka, bila dilihat dari aspek sejarah, merupakan aktor yang tumbuh dan berkembang di dalam adat dan budaya masyarakat sejak era pra kolonial dan masa kolonial. Mereka lahir dengan berbagai pengalaman kekerasan di sekeliling mereka. Sikap, tindakan, serta cara pandang yang berlaku di masyarakat merupakan benih internalisasi budaya kekerasan yang melekat dalam diri orang kuat lokal. Bahkan rupa mereka di masa lalu tak jarang adalah para pemberontak, pembela rakyat, penolong kaum papa – yang dengan kekuatan serta keberanian yang dimiliki, bersama-sama melakukan perlawanan terhadap kesemena-menaan para elit, baik elit penjajah maupun elit feodal lokal. Cerita rakyat ini turun temurun diwariskan dalam beberapa kisah heroik semisal Ken Arok, Samin, dan Pitung.[16] Eksistensi mereka bila merunut pada kesimpulan Migdal, adalah imbas dari pola adat yang sudah mengakar dalam kultur di masyarakat. Dan yang tak kalah penting, keberadaan orang kuat lokal merupakan kiamat bagi jalannya efektifitas dan dominasi negara atas masyarakat – sebab negara otomatis menjadi lemah dan gagal untuk melakukan kontrol. Atau dengan bahasa yang lebih halus, akan sulit untuk melakukan berbagai perubahan melalui program serta kebijakan yang tengah dicanangkan. Faktor munculnya orang kuat lokal dan sepak terjang mereka oleh migdal dijelaskan sebagai berikut.

---

[16] Abd. Halim, *Politik Lokal Pola Aktor & Alur Dramatikalnya:Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung,* (Yogyakarta: LP2B, 2014), hlm. 60.

> "Pertama, *Local Strongman* tumbuh subur dalam masyarakat yang mirip dengan jaringan. Berkat struktur yang mirip jaringan inilah, para orang kual lokal mendapatkan pengaruh signifikan yang jauh melebihi pengaruh para pemimpin dan para birokrat lokal formal. Kedua, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai strategi bertahan hidup". Logika bertahan hidup, memberikan kesempatan bagi *Local Strongman* bukan saja bagi membangun legitimasinya di mata rakyat yang mengharapkan ibanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi juga memperluas kekuasaannya. Personalisme orang kuat lokal menempatkan mereka sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi kliennya (baca:pengikutnya) yang (serba) kekurangan – di daerah kekuasaan mereka. Ketiga, *Local Strongman* secara langsung ataupun tidak langsung telah berhasil membatasi kapasitas lembaga dan aparatur negara sehingga menyebabkan pemerintah lemah."[17]

Mengenai fenomena *local strongman* tersebut, Migdal memiliki tiga pendapat yang saling berkaitan tentang *Local Strongman* yaitu :

a. Orang kuat lokal tumbuh subur di dalam masyarakat "mirip jaringan" yang digambarkan sebagai "sekumpulan campuran organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri" dengan "kontrol sosial" yang efektif "terpecah-pecah" Pola kontrol sosial khusus terpecah-pecah ini, seringkali diakui menyatu dalam pemerintahan kolonial dan penyatuannya di dalam perkuburan kelas-kelas pemilik tanah besar. Berkat struktur masyarakat jaringan, orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui para pemimpin negara dan para birokrat lokal yang digambarkan migdal sebagai "segitiga penyesuaian"

[17] Abd. Halim, *Politik Lokal Pola Aktor & Alur Dramatikalnya:Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung,* (Yogyakarta: LP2B, 2014), hlm. 65

b. Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan ”strategi bertahan hidup” penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah “personalisme”, klientilisme, dan “hubungan patron klien” serta melukis orang kuat lokal sebagai penempatan peran pxatron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut didaerah kekuasaan mereka.

c. Berhasilnya orang kuat lokal menguasai lembaga-lembaga dan sumber daya negara merintangi atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan[18]

Teori *Local Strongman* digunakan karena tema *Local Strongman* memiliki 3 argumentasi yang menarik untuk dianalisa pada kemenangan Agus Sudrajat sebagai kepala desa Sinagar Kabupaten Tasikmalaya.

2. Konsep Patronase Dalam Kontestasi Politik

Kata patron berasal dari bahasa latin *pater* yang berarti bapak, dari bapak berubah menjadi *patris* dan patronis yang artinya bangsawan atau *patricius* yang artinya seseorang yang dianggap pelindung sejumlah rakyat jelata yang menjadi

[18] *Ibid,* Hlm. 65

pengikutnya. Sebaliknya klien atau *client* berasal dari kata *cliens* yang berarti pengikut. Mereka adalah orang-orang merdeka yang sejak dahulu atau bekas budak yang dimerdekakan. Mereka menggantungkan diri pada patron, bahkan kadang menggunakan nama paham sang patron[19].

Patronase merupakan konsep kekuasaan yang berasal dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena yang terjadi seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang. Dalam hal seperti ini Scott (1972:92) berpendapat bahwa:

> "*The patron-client relationship—an exchange relationship between roles—may be defined as a special case of dyadic* (*two person*) *ties involving a large instumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status* (*patron*) *uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status* (*client*) *who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron*."
>
> "Hubungan patron-klien, hubungan pertukaran antar peran, dapat didefinisikan sebagai kasus khusus ikatan dua orang yang melibatkan persahabatan instumental besar dimana seorang individu/ perorangan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (pelindung) menggunakan

[19] Fadli Ichsan, Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kampala, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Filsafat & Politik, Jurusan Ilmu Politik (Universitas Islam Negeri, 2016), h.28

> sumber daya dan pengaruhnya sendiri untuk menyediakan perlindungan atau tunjangan, atau keduanya, untuk seseorang yang berstatus lebih rendah (klien) yang, untuk bagiannya, membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi, kepada pelindung" (terjemahan dari penulis)

Sedangkan, Lande (1977:xx) mendefinisikan relasi patronase ini sebagai berikut:

> *"A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as anally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client."*
>
> "Hubungan klien patron adalah diad vertikal, yaitu, aliansi antara dua orang dengan status, kekuatan, atau sumber daya yang tidak sama yang masing-masing merasa berguna untuk memiliki secara analitis seseorang anggota superior dari aliansi semacam itu disebut pelindung. Anggota yang lebih rendah disebut kliennya. " (terjemahan dari penulis)

Merujuk pada uraian di atas, patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak sepadan tetapi saling membutuhkan. Di satu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek status, kekayaan maupun pengaruh. Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang patron. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai relasi yang berlandaskan pertukaran kepentingan. Asumsi dasar kerangka konsep ini menempatkan cara berpikir yang menegaskan bahwa hubungan akan

terjadi jika kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalani. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan berupa ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai imbalan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan dukungan, pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron.

Kendati hubungan patronase berlandaskan pada nilai-nilai pertukaran kepentingan, tetapi pertukaran tersebut tetaplah tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh penguasaan secara langsung atas sumber daya utama (*first order resources*) yang tampak dalam ruang lingkup masyarakat ataupun negara. Sumber-sumber ini bisa berupa pekerjaan, jabatan, lisensi dan lain-lain. Sejalan dengan fenomena ini, maka ada pula patron lapis kedua yang tidak memiliki sumber-sumber daya utama atau strategis, tetapi memiliki akses terhadapnya (*second order resources*) yang disebut sebagai broker. Para broker yang menjadi perantara antara patron utama dengan klien tumbuh subur di negara otokratik karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari individu-individu yang memiliki *first order resources*.[20]

Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai patronase diartikan sebagai pendistribusian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada para pekerja, pemilih atau pegiat kepentingan, dalam rangka mendapatkan dukungan politik mereka. Patronase juga merupakan pemberian barang, uang tunai, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti

[20] Leo Agustino, Patronase Politik Era Repormasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar Dan Provinsi Jambi, *Jurnal Administrasi Publik* Vol.11, 2, 2014

kontrak proyek atau pekerjaan) yang dibagikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kepada komunitas.

Sejalan dengan masalah tersebut diatas, transformasi politik yang sedang berlaku di Indonesia dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, telah memberikan dampak negatifnya tersendiri bagi proses demokratisasi. Hal Ini karena pemilihan kepala daerah secara langsung telah membuka peluang bagi patronase (logika pertukaran kepentingan) yang lebih dalam lagi. Para kepala daerah terpilih berupaya menggunakan jabatannya untuk memainkan peranan sebagai pemilik sumber utama. Peranan ini bukanlah satu hal yang sulit untuk dilakukan oleh para kepala daerah, melalui jabatannya, para pemimpin politik ini mempunyai banyak kesempatan untuk menggunakan institusi publik sebagai domain kekuasaannya, serta mendistribusikan *public resources* yang berada di bawah kuasanya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu ketika diperlukan. Ketidak seimbangan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini korelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang.

Perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien:

1. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja.
2. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi.

Peter M. Blau berpendapat bahwa hubungan patron-klien lebih merupakan hubungan pertukaran yaitu:

1. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang berharap imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
2. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar keuntungan.
3. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (alam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar).
4. Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan atau penghrgaan dan kepatuhan.[21]

Ciri-ciri hubungan patron-klien:

1. Adanya ketidak seimbangan status antara patron dan klien.
2. Meskipun patron juga berharap bantuan dari klien, tetapi posisi patron lebih tinggi dari klien.
3. Ketergantungan klien pada patron kerena adanya pemberian barang yang dibutuhkan klien dari patron yang menyebabkan adanya perasaan hutang budi klien pada sang patron.
4. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan.

   Ada dua jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patro, yaitu:

   a. Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron diladang, sawah atau usaha lainnya

[21] Ng. Philipus, M.S. Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik* cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada), h. 43

b. Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia menjadi kaki tangan patron[22]

[22] Ng. Philipus, M.S. Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik* cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada), h. 44

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian-penelitian yang pernah dibuat oleh peneliti sebelumnya yang dinilai relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang. Maka dari itu, berikut penulis lampirkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan dinilai relevan dengan judul sekarang, diantaranya:

1. Dampak Keterlibatan Botoh Pada Implementasi PILKADES di Ponorogo. Skripsi oleh Tri Nurcahyono, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.[23]

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Pohijo terdapat fenomena Pilkades yang menarik untuk dipelajar karena terdapat keterlibatan Botoh pada implementasi Pilkades (Pilihan Kepala Desa) yang diadakan setiap 6 tahun sekali. Botoh terdiri dari seseorang individu atau kelompok yang memiliki kepentingan didalam pilkades. Botoh dalam penelitian ini diposisikan sebagai seorang *Local Strongman* (orang kuat lokal) dikarenakan kehadirannya mampu memiliki pengaruh nyata dalam memegang kendali jalannya putaran Pilkades. Keterlibatan Botoh tersebut membawa dampak yang tidak baik seperti halnya adanya perjudian para Botoh, money politik, mengganggu (HAM) pribadi seseorang individu maupun kelompok, pencarian

[23] Tri Nurcahyono "DAMPAK KETERLIBATAN BOTOH PADA IMPLEMENTASI PILKADES DI PONOROGO (Studi di Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur)," artikel ini diakses pada tanggal 24 Desember 2018 dari http://eprints.umpo.ac.id/2654/1/A%20HALAMAN%20DEPAN.pdf

kambing hitam (untuk disalahkan) dan lain sebagainya yang rentan memunculkan konflik antar-sesama masyarakat.

Dampak yang terjadi sebagaimana dimaksud diatas dikarenakan adanya strategi Botoh yang menggunakan uang sebagai alat politik untuk memperoleh atau memperbanyak jumlah masa yang di dedikasikan untuk pemenangan calon kepala desa yang mereka usung karena menyangkut adu gengsi dan memenangkan permainan uangnya dalam konteks perjudian. Selain hal tersebut diatas strategi lainnya dari Botoh adalah menjalin kerja sama dengan Tim Sukses dengan dasar persamaan ideologi dan tujuan dari keterlibatan keduanya dalam kualisi Pilkades yakni untuk memenangkan calon kepala desa yang berada di pihak mereka. Kendati demikian, pada dasarnya Botoh manyadari bahwasanya peran dan keterlibatan pada Pilkades membawa dampak negatif yang tidak baik bagi perkembangan generasi masa depan, Organisasi/Kelompok, maupun Pemerintah Desa khusunya bagi masyarakat. Oleh karena inilah Botoh bersama Tim Sukses, kepala desa dan masyarakat mengemukakan keinginan dan harapannya tentang pelaksanaan pemilu/Pilkades seharusnya dilaksanakan secara jujur, adil, bersih, transparan dan demokasi sesuai dengan filosofi demokrasi UUD 1945 serta nilai/norma yang terkandung dalam sisi keagamaan terutama terkait dengan implementasi Pilkades.

2. Orang Kuat Dalam Dinamika Politik Lokal Studi Kasus: Kekuasaan Politik Fuad Amin Di Bangkalan Skripsi oleh Ahmad Nurcholis Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik Fuad Amin menjadi dominan karena tidak adanya lembaga hukum setempat yang independen, yang berani menangani segala penyelewengan yang dilakukan Fuad. Adanya laporan penyelewengan yang dilakukan oleh Fuad Amin, semisal kasus korupsi, dan kekerasan terhadap para aktivis selalu dilantarkan di meja polisi dan kejaksaan setempat. Kekuasaan politik Fuad Amin semakin bertambah ketika dirinya berhasil menjadi Bupati Bangkalan pada tahun 2003 dan tahun 2008. Dengan memegang dua kekuatan, baik formal maupun informal, pucuk dominasi Fuad semakin tak terbendung. Fuad amin seperti raja yang bebas berbuat semau hati dan tanpa kontrol yang tak terbatas. Gambaran ini tergambarkan dari kekuatan politiknya yang bukan sebatas ada di jaringan didalam pemerintahan dan partai politik, tetapi menyebar ke setiap ormas-ormas, kelompok-kelompok informal dan institusi pendidikan.

3. Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pilkades di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukampa Kabupaten Bulukamba

Hasil penelitian menemukan bahwa hubungan patron klien dalam pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo sangat berpengaruh dalam memenangkan Hj. Marniwati. Adapun bentuk patronase dalam pilkades yang terjadi dalam hubungan ekonomi, dan politik. Dalam hubungan ekonomi yang dimaksud adalah tokoh masyarakat (patron) memiliki kekayaan, dan keterampilan yang diperlukan kehadirannya bagi masyarakat petani (klien). Sehingga klien merasa terbantu atas bantuan seorang tokoh masyarakat (patron), kemudian klien membalas kebaikan atas bantuan yang diberikan kepadanya sehingga dapat mengabdikan dirinya atas

kepentingan seorang patron. Sedangkan dalam hubungan politik adalah tokoh masyarakat (patron) punya peranan penting dalam setiap pemilihan, sehingga Hj. Marniwati dapat membangun kemunikasi terhadap patron dengan tujuan memenangkan pemilukades. Adapun pengaruh patronase terhadap partisipasi pemilih di desa Jojjolo yakni: a) Dikuasainya suara pada pilkades disebabkan karena tokoh masyarakat (patron) ikut terlibat dalam memperebutkan jabatan politik untuk mendukung Hj. Marniwati dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Jojjolo, kemudian bentuk hubungan ini merupakan balas jasa dari klien atas dasar bantuan yang diberikan kepadanya . b) tingginya partisipasi pemilih dalam pilkades karena masyarakat petani (klien) merasa berutang budi terhadap bantuan patron, sehingga menyebabkan klien berpartisipasi dalam memilih Hj Marniwati sebagai calon kepala desa di Desa Jojjolo.
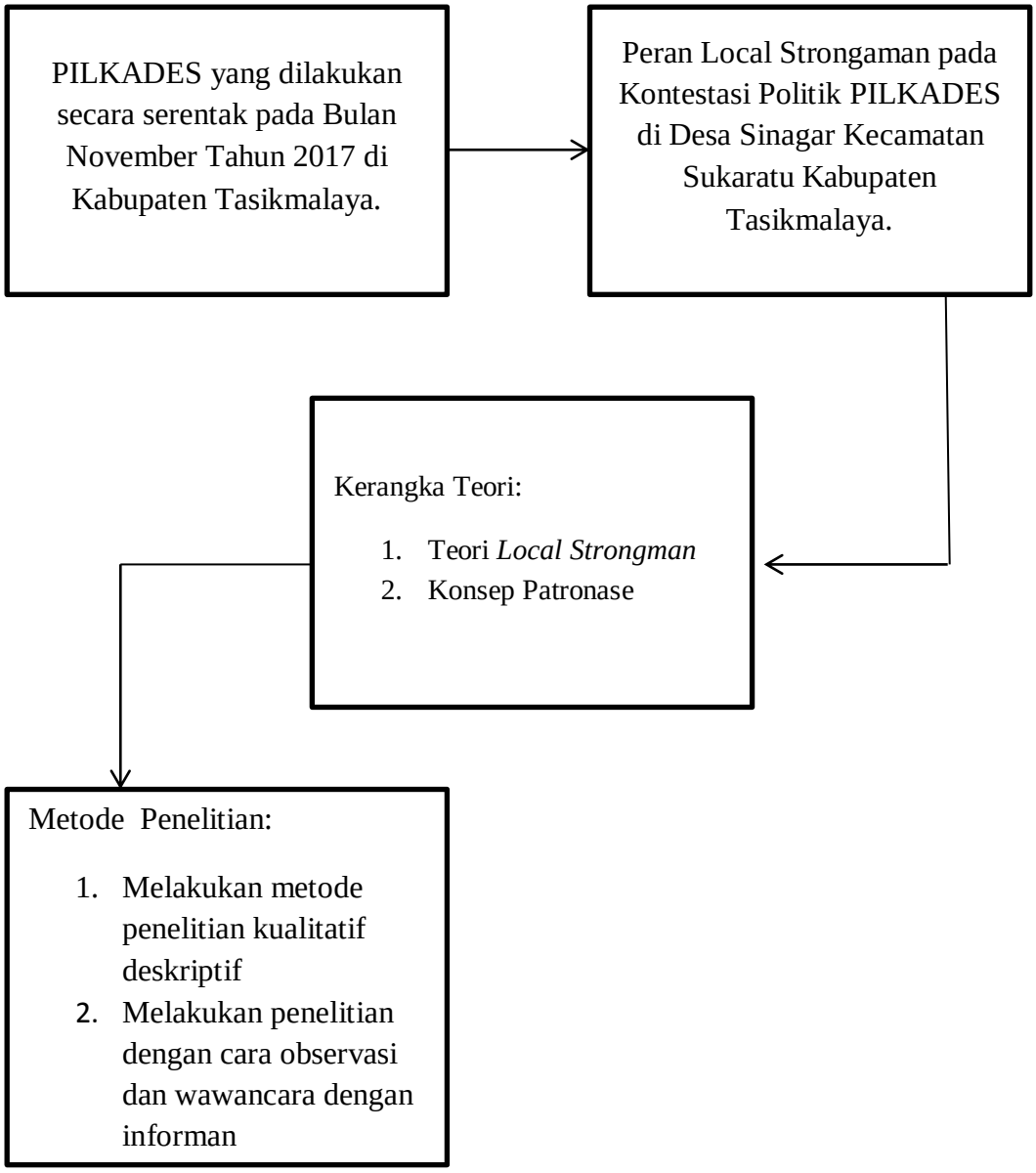
C. Kerangka Pemikiran